

## NASIONALISME ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Oleh : Agie Hanggara

### PENDAHULUAN

Negara-negara Asia Tenggara adalah negara-negara multietnis, multiagama, dan negara baru. Sebagian besar negara-negara ini mendefinisikan bangsa ke dalam terminologi “budaya pribumi”. Namun di kalangan bangsa-bangsa ini ada pula yang mendefinisikan bangsa ke dalam pengertian ras dan etnik, atau semata-mata berdasarkan terminologi budaya. Dalam kasus Indonesia, pemerintah ingin membentuk sebuah masyarakat multietnis menjadi bangsa yang memiliki rasa kepemilikan bersama. Satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Sasaran kebijakan pemerintah Indonesia adalah mengasimilasikan dan menyerap etnis Tionghoa ke dalam penduduk pribumi Indonesia.

Leo Suryadinata menyatakan, ketika jumlah orang Tionghoa masih sedikit pada abad ke 18, mudah bagi populasi Asia Tenggara termasuk Indonesia, untuk menyerap mereka. Tapi sejak paruh abad ke 19, setelah gelombang besar populasi Tionghoa masuk ke Asia Tenggara, asimilasi menjadi lebih sulit. Bahkan sampai saat ini pun, sebagian besar etnis Tionghoa yang tetap kental karakteristik ke-Cina-annya adalah para imigran yang datang belakangan. Para imigran Cina ini disebut *Zhongguo Qiaomin* (warga Cina yang tinggal di luar negeri) atau *Huaqiao* (warga Cina yang bermukim di negara asing) oleh pemerintah Cina. Kukuhnya ataupun merosotnya identitas orang-orang Tionghoa, khususnya identitas politik yang kuat dengan negeri Cina, adalah akibat dari dua faktor yaitu ; (1) kebijakan Cina terhadap golongan minoritas di perantauan ini dan (2) pengaruh situasi lokal Asia Tenggara.

Kebangkitan kembali Cina telah membuat sebagian etnis Tionghoa menjadi lebih sadar akan warisan budaya mereka. Generasi pertama etnis Tionghoa Asia Tenggara yang tidak kehilangan warisan budaya Cina mereka, sebenarnya merasa secara kultural berorientasi terhadap Cina yang kembali bangkit. Bagi sebagian besar orang Tionghoa Asia Tenggara yang lahir dan dibesarkan di wilayah tersebut, daya tarik kebangkitan kembali Cina, tidaklah terlalu besar. Mereka mungkin bangga dengan warisan budaya mereka dan mungkin mencari asal usul mereka di kampung halaman nenek moyang mereka. Tetapi, identifikasi budaya mereka dengan Cina akan menipis karena kenyataan bahwa mereka tinggal di wilayah di mana nasionalisme pribumi sangat kuat. Mereka harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan regional. Kemungkinan, mereka lebih berorientasi terhadap negara yang mereka diami, asal saja negara tersebut tidak memberlakukan kebijakan diskriminasi yang mencolok terhadap etnis Tionghoa.

Munculnya nasionalisme Indonesia berkaitan erat dengan adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Usaha untuk menolak kolonialisme inilah yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan tekanan-tekanan yang disebut nasionalisme. Melalui keinginan bersama yang didasarkan oleh persamaan kepentingan itu akhirnya menciptakan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme mengacu pada paham yang mementingkan perbaikan dan kesejahteraan nasion atau bangsanya. Kelompok-kelompok suku atau etnik-etnik yang bersifat lokal dikoordinasikan secara kolektif untuk menuju keinginan bersama dan klimaksnya adalah pembentukan nasion Indonesia.

Dalam penulisan sejarah Indonesia, peranan orang Tionghoa dalam berbagai hal hampir tidak pernah disebutkan secara panjang lebar meskipun banyak bukti sejarah yang menunjukkan sumbangan etnis Tionghoa bagi perkembangan Indonesia, misalnya dalam bidang agama, kesusasteraan, bahasa, kesenian, olah raga, bangunan, teknologi makanan dan dalam bidang kedokteran bahkan gambaran umum mengenai etnis Tionghoa di Indonesia yang ada selama ini adalah stigma bahwa golongan Tionghoa merupakan

“binatang ekonomi” (*economic animal*) yang bersifat oportunis, tidak memiliki loyalitas politik, tidak nasionalis, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalaupun masyarakat etnis Tionghoa disinggung dalam penulisan sejarah biasanya banyak berkaitan dengan peranannya di bidang ekonomi sebagai penguasa jalur ekonomi perantara yang banyak merugikan masyarakat pribumi dari kota sampai pelosok desa. (Yuanzhi, 2005).

Berdasarkan kajian tersebut, dalam hal ini penulis akan mencoba mengungkapkan

**“Bagaimana Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia baik periode sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan termasuk masalah dan prospeknya”.**

## **NASIONALISME ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA**

### **Periode Sebelum Kemerdekaan Bangkitnya Nasionalisme Tionghoa**

Asal-usul nasionalisme Tionghoa di Indonesia ditandai dengan pembentukan sebuah organisasi sosial keagamaan Tionghoa yang dikenal dengan nama Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) pada tahun 1900. Pada tahun yang sama, Phoa Keng Hek, Presiden THHK mengirim surat kepada komunitas Tionghoa menjelaskan pentingnya Konfusianisme dan alasan-alasan pendirian THHK. Pada saat yang sama, Phoa Keng Hek dan anggota komite pelaksana juga mengingatkan kalangan Tionghoa untuk mendukung sekolah THHK Tionghoa yang akan mereka bangun. Untuk pertama kalinya, ada upaya yang dilakukan dengan mengorientasikan kalangan Tionghoa Hindia Belanda terhadap Tiongkok. Tujuh tahun kemudian, Phoa Keng Hek menceritakan kembali pendirian sekolah THHK dan posisi yang sulit dari kalangan Tionghoa Hindia Belanda dibawah Undang-undang Belanda, dan berargumen bahwa bahasa Tionghoa dan Inggris lebih bermanfaat dibandingkan bahasa Belanda bagi kalangan Tionghoa Hindia Belanda dalam kehidupan yang lebih baik.

Namun demikian, adalah *Sin Po*, surat kabar harian kalangan peranakan, dan bukan THHK yang kemudian menjadi

jawara dari nasionalisme Tionghoa. Pada tahun 1918, terjadi konflik rasial yang besar antara penduduk lokal Tionghoa dengan masyarakat pribumi Indonesia di Kudus. *Sin Po* memberikan komentar atas kejadian tersebut, menganalisis hubungan antara kalangan nasionalis pendatang Tionghoa dengan kalangan nasionalis Indonesia dan menyatakan secara tidak langsung bahwa mereka harus bekerja untuk kebaikan bersama dalam memperbaiki kondisi kehidupan kedua ras tersebut, karena dalam pandangan *Sin Po*, mayoritas masyarakat Tionghoa, sebagaimana juga mayoritas masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah miskin. Namun demikian, *Sin Po* mengakui bahwa terdapat potensi konflik antara para pedagang Tionghoa dengan pedagang pribumi yang merupakan minoritas dalam komunitas mereka masing-masing.

Tujuh tahun kemudian, Pimpinan Redaksi *Sin Po*, Tjoe Bou San, menulis dengan namanya sendiri sebuah tulisan di *Sin Po* yang mengekspresikan pandangan yang tidak sejalan dengan sentimen *Sin Po* yang ditunjukkan selama peristiwa Kudus di tahun 1918. Selama tahun 1918-1919, Tjoe juga melakukan kampanye menentang undang-undang kekawulaan Belanda yang memaksa semua orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda menjadi kawula Belanda. Ia menuntut dengan tegas bahwa orang-orang Tionghoa Hindia Belanda tetap berkebangsaan Tiongkok.

*Sin Po* mengajarkan bahwa orang Tionghoa di Indonesia harus tetap menjadi orang asing, menerima pendidikan Tionghoa, dan tidak terlibat dengan lembaga-lembaga politik lokal. Kwee Kek Beng, Pimpinan Redaksi *Sin Po* setelah Tjoe Bou San, sepakat bahwa dewan perwakilan (seperti Volksraad) pada dasarnya adalah penasihat dan tidak hanya tidak berguna bagi kalangan Tionghoa untuk berpartisipasi tapi juga berbahaya karena ini akan memecah-belah komunitas Tionghoa.

### **Kelompok Berorientasi Hindia Belanda**

Berbeda dengan kelompok *Sin Po*, sejumlah orang Tionghoa kaya dan berpendidikan Belanda mendukung pemerintah Belanda dan undang-undang

kekawulaan Belanda. Mereka menyetujui partisipasi etnis Tionghoa dalam lembaga-lembaga politik lokal dan pendidikan Belanda sambil memperbaiki posisi ekonomi kalangan Tionghoa. Kan Hok Hoei, seorang Tionghoa berpendidikan Belanda yang paling vokal, dan yang dipilih sebagai anggota *Volksraad* mewakili kalangan Tionghoa Hindia Belanda, berpendapat bahwa orang Tionghoa di Hindia Belanda merasa senang dengan pemerintah Belanda dan ingin tetap menjadi kawula Belanda. Namun, ia menambahkan bahwa orang Tionghoa Hindia Belanda ingin mendapat status hukum yang setara dengan orang Jepang dan Belanda. Puncak dari gerakan yang berorientasi Hindia Belanda ini adalah pembukaan Kongres Chung Hwa tahun 1927 dan pembentukan Chung Hwa Hui (CHH) di Hindia Belanda pada tahun berikutnya ketika Kan Hok Hoei terpilih sebagai presidennya. Kan Hok Hoei (1881-1951), lahir di Jakarta, menempuh pendidikan menengah Belanda. Sebagai tuan tanah dan usahawan terkemuka, tahun 1918 ia ditunjuk oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil kalangan Tionghoa di *Volksraad*. Pada tahun 1928 ia terpilih sebagai Presiden Chung Hwa Hui dan menempati posisi itu hingga pembubaran organisasi tersebut tahun 1942.

Gerakan berorientasi Hindia Belanda dari CHH mendapat dukungan dari kalangan intelektual peranakan. Kwee Tek Hoay, pemimpin redaksi *Panorama* dan aktivis pada awal-awal gerakan Tionghoa, berpendapat bahwa partisipasi dalam *Volksraad* sangat berguna dan keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik lokal tidak akan memecah belah kalangan Tionghoa Hindia Belanda karena pertama-tama masyarakat Tionghoa bukanlah sebuah kelompok yang homogen. Ia mengkritik kelompok *Sin Po* karena menyesatkan kalangan Tionghoa Hindia Belanda dengan mengarahkan orientasi masyarakat Tionghoa Hindia Belanda ke Tiongkok.

#### **Kelompok Berorientasi Indonesia**

Sekelompok orang Tionghoa yang pro Indonesia berupaya menggambarkan

kemitraan mereka yang sangat dekat dengan kalangan nasionalis Indonesia dan mendukung pemerintahan sendiri bagi Indonesia. Kelompok ini diwakili oleh Liem Koen Hian, jurnalis peranakan dan Ko Kwat Tiong, pengacara peranakan. Kedua orang tersebut dan kalangan peranakan lainnya yang pro Indonesia, tahun 1932 mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang menganjurkan nasionalisme Indonesia bagi masyarakat Tionghoa Hindia Belanda. Liem Koen Hian, Presiden pertama partai ini membuat analisis tentang ketiga aliran politik yang ada (*Sin Po*, CHH, dan PTI) di Hindia Belanda, berpendapat bahwa aliran politiknya sangat realistis dan menguntungkan kalangan peranakan Tionghoa yang menjadi kawula Belanda. Indonesia, di mata Liem Koen Hian adalah tanah air dan negeri bagi etnis peranakan Tionghoa. Walaupun menganjurkan identitas politik Indonesia, bagi kalangan Tionghoa, Liem tidak mendorong penyerapan secara total masyarakat peranakan Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia, meskipun ia membayangkan bahwa bila waktunya tiba proses tersebut tidak dapat dihentikan.

Namun, Kwee Hing Tjiat mantan editor *Sin Po* yang kecewa dengan Tiongkok mulai menganjurkan pembauran total masyarakat Tionghoa Hindia Belanda ke dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Kwee adalah "Bapak" dari ide pembauran total. Tapi banyak kalangan peranakan yang mengkritik konsepnya. Chan Kok Cheng, seorang jurnalis terkemuka menanggapi negatif ide Kwee. Kwee Tek Hoay, jurnalis terkenal lainnya yang memiliki simpati terhadap CHH, menganalisis tiga aliran politik utama tersebut dalam komunitas Tionghoa pada tahun 1930an. Setelah memberikan pujian kepada PTI, Kwee Tek Hoay mengemukakan argumen bahwa ide CHH adalah yang paling sesuai untuk mayoritas Tionghoa di Indonesia.

#### **Orientasi Masyarakat Tionghoa selama Pendudukan Jepang**

Menjelang kemerdekaan Indonesia, masyarakat Tionghoa di

Indonesia masih terpecah dalam berbagai orientasi. Dengan demikian, pandangan-pandangan yang pro Indonesia, pro Tionghoa, dan Pro Jepang hidup berdampingan. Liem Koen Hian, pemimpin PTI dalam pidatonya di Sidang Paripurna Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (11 Juli 1945) mendesak badan tersebut untuk mendeklarasikan bahwa orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia yang akan datang, karena orang Tionghoa ini melihat Indonesia sebagai tanah air mereka dan mereka tinggal di Indonesia. Namun, Koi Tejong Hauw, mantan pemimpin CHH mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Indonesia di masa depan, seluruh orang Tionghoa Indonesia harus dinyatakan sebagai warga negara Tiongkok, meskipun mereka tetap tinggal di Indonesia.

Dalam pandangannya, orang Tionghoa di Indonesia, akan mengidentifikasikan diri mereka dengan Tiongkok. Oei Tiang Tjoei, editor surat kabar Tionghoa peranakan pro Jepang, berargumentasi bahwa orang Tionghoa lokal harus diizinkan untuk memilih warga negara Indonesia atau Tiongkok.

#### **Tokoh Peranakan Tionghoa Indonesia**

Berikut ini adalah tokoh peranakan Tionghoa Indonesia yang sangat berpengaruh dalam menyuarkan nasionalisme Indonesia melalui berbagai cara, lembaga dan keahlian masing-masing seperti dalam bidang hukum, sastra, dan keagamaan. Tokoh-tokoh Tionghoa yang aktif sebelum kemerdekaan RI adalah sebagai berikut:

##### **Tjoe Bou San**

Tjoe Bou San yang lahir pada 1891 adalah anak seorang pedagang tekstil di Jakarta. Tjoe mempunyai dua orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Tidak banyak keterangan tentang pendidikannya. Mungkin ia pernah masuk sekolah swasta Belanda selama beberapa tahun. Mungkin juga ia sekolah Hok Kian dan belajar bahasa Belanda, Inggris dan Melayu sendiri. Yang pasti ia pandai berbahasa Melayu Betawi. Penguasaannya terhadap bahasa

Belanda, Inggris dan Tionghoa rupanya agak terbatas. (Suryadinata, 2010)

Pada usia 18 tahun, ia menjadi pemimpin redaksi sebuah majalah mingguan yang bernama *Hoa Tok Po* edisi Melayu. *Hoa Tok Po* adalah majalah berskala resmi *Soe Po Sia*, sebuah organisasi totok yang berhaluan nasionalisme Tionghoa. Sejak Februari sampai dengan Juni 1917, ia memimpin surat kabar *Tjhoen Tjhioe*. Tak lama kemudian, ia bekerja sebagai koresponden harian *Sin Po* edisi Melayu yang dipimpin oleh Kwee Hing Tjiat. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi pemimpin redaksi harian tersebut menggantikan Kwee Hing Tjiat yang ingin berangkat ke Eropa. Pada tahun 1919, Tjoe merangkap sebagai direktur *Sin Po*. Ketika Tjoe menjadi pemimpin redaksi *Sin Po*, koran itu menjadi corong nasionalisme Tionghoa yang berpengaruh. Tjoe lah yang mengembangkan konsep nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda dan memimpin kampanye dalam memberantas kekawulaan Belanda setelah usai Perang Dunia ke I.

##### **Kwee Hing Tjiat**

Lahir di Surabaya pada tahun 1891. Kwee Hing Tjiat adalah putra ke empat dari keluarga Kwee Swie Hian. Mula-mula Kwee Hing Tjiat bersekolah di Buys Institute dan melanjutkan di BAS. Keduanya adalah sekolah Belanda. Setelah ia lulus, ia bekerja di bagian administrasi Firma Kian Goan, sebuah perusahaan besar milik peranakan Tionghoa.

Pada tahun 1911, dengan ikhtiar sendiri ia berhasil menerbitkan mingguan *Asia* di Surabaya. Kemudian, pada Oktober 1913, Kwee Hing Tjiat meninggalkan mingguan *Asia* dan mendirikan mingguan yang baru bernama *Bok Tok*. Kwee berpendapat bahwa wartawan harus melindungi yang baik dan menindas yang buruk. Oleh karena keyakinan inilah, Kwee Hing Tjiat senantiasa membuat kritik terhadap masyarakat Tionghoa dan kolonial di Indonesia. Mingguan *Bok Tok* yang dipimpinnya itu, pada tahun 1914 berubah menjadi *Tjhoen Tjhioe*. Dari sini Kwee berhasil mengundang banyak

orang terkemuka untuk menulis dalam mingguannya itu. Setahun kemudian Kwee meninggalkan Tjhoen Tjhioe, pindah ke Yogyakarta, dimana ia menerbitkan mingguan *Palita*. Ketenaran Kwee sebagai seorang wartawan mendapat pengakuan luas. Pada Oktober 1915, Hauw Tek Kong, penerbit *Sin Po* di Jakarta mengundang Kwee untuk menjadi wakil pimpinan Redaksi dan kemudian pemimpin redaksi harian *Sin Po*.

#### **Kwee Tek Hoay**

Kwee Tek Hoay lahir di Bogor, Jawa Barat, 31 Juli 1886. Kwee Tek Hoay adalah anak bungsu dari pasangan Kwee Tjiam Hong dan Tan Ay Nio. Sejak usia 8 tahun, Kwee Tek Hoay masuk sekolah Tionghoa yang menggunakan bahasa pengantar Hokkian. Namun dia sering membolos karena tidak mengerti bahasa pengantar yang digunakan itu. Pendidikan formal terakhir yang ditemukannya setara dengan sekolah dasar masa kini. Setelah itu ia belajar dibawah bimbingan oleh seorang guru. Pada masa itu, keturunan Tionghoa tidak diperkenankan masuk sekolah Belanda, jika bukan anak seorang bangsawan atau berpangkat. Kwee Tek Hoay belajar tata buku dan akuntansi dari seorang guru sekolah Belanda. Dia juga giat mempelajari bahasa Melayu, Belanda dan Inggris yang kemudian membuatnya sangat gemar membaca buku-buku dalam ketiga bahasa tersebut. Kwee Tek Hoay menikah dengan Oei Hiang Nio pada bulan Februari 1906. Mereka dikaruniai tiga anak, yakni seorang perempuan dan dua anak lelaki. Putri sulungnya yang bernama Kwee Yat Nio mengikuti jejak Kwee Tek Hoay menekuni bidang jurnalistik. Sedangkan kedua adiknya, Kwee Tjun Gin dan Kwee Tjun Kouw lebih tertarik dalam perdagangan. Pada 4 Juli 1952 Kwee Tek Hoay wafat di Cicurug Sukabumi akibat dianiaya perampok yang menyatroni rumahnya. Dia merupakan orang pertama yang minta jenasanya diperabukan dan sejak saat itu banyak orang Tionghoa mengikuti jejaknya. Kwee Tek Hoay adalah penganut Budha Tridharma yang taat. Ia menerbitkan majalah berbahasa Indonesia pertama

yang berisikan ajaran Agama Buddha dengan nama *Moestika Dharma* (1932-1934). Dari majalah ini diketahui bahwa telah berdiri sebuah organisasi Buddhis bernama *Java Buddhist Association* di bawah kepemimpinan E. Power dan Josias van Dienst. Organisasi ini merupakan anggota *International Buddhist Mission* yang berpusat di Thaton Birma dan mengacu pada aliran Buddha Theravada. Perkembangan jaman yang mempengaruhi peranakan Tionghoa membuat mereka mengalami krisis identitas kebudayaan dan agama. Kwee Tek Hoay kemudian berusaha mengembalikan kebudayaan leluhurnya dengan menulis tentang "Agama Tionghoa" yang merupakan gabungan dari tiga agama, yakni Konfusianisme, Buddhisme dan Daoisme (Taoisme). Pemikirannya tentang tiga agama itu kemudian dimuat dalam majalah Sam Kauw Gwat Po.

#### **Liem Koen Hian**

Dalam buku Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia yang ditulis Leo Suryadinata, Liem Koen Hian lahir di Banjarmasin tahun 1896. Awalnya dia bekerja sebagai juru tulis di perusahaan minyak Shell di Balikpapan. Namun akhirnya dia lebih tertarik pada dunia jurnalistik. Liem mengawali karir di majalah Tjhoen Tjhioe. Liem kemudian menjadi pemimpin redaksi Sinar Soematra tahun 1918. Di sini dia kencang menulis soal nasionalisme Tionghoa. Seperti diketahui saat itu di Hindia Belanda, orang eropa menjadi golongan pertama. Baru setelahnya Tiongkok, Arab dan masyarakat Asia lain, di posisi ketiga baru kaum pribumi. Orang-orang Tionghoa saat itu gencar meminta mereka dijadikan golongan pertama seperti orang Eropa.

Tahun 1925, Liem menjadi pemimpin redaksi *Pewarta Soerabaia*. Dia terus memperjuangkan nasionalisme Tionghoa dan mengkritik kolonialisme Belanda. Konon, karena tulisannya yang keras akhirnya dia terpaksa meninggalkan *Pewarta Soerabaia*. Liem kemudian berkenalan dengan Tjipto Mangunkusumo. Seorang tokoh pergerakan Hindia Belanda. Diskusi panjang lebar dengan Tjipto ini yang

mengubah pandangan politik Liem. Liem menerima konsep Tjipto tentang pembentukan sebuah bangsa Hindia yang terdiri dari orang-orang yang menganggap Hindia tanah air mereka dan ikut aktif membangunnya. Menurut konsep ini, peranakan Indo-Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab merupakan bagian dari sebuah bangsa yang akan terbentuk itu.

Pandangan Liem ini ditentang kelompok *Sin Po* yang hanya memperjuangkan keturunan Tionghoa agar mendapat perlakuan sama dengan keturunan Eropa. Dia juga berseberangan dengan kelompok Chung Hwa Hui (CHH) yang pro-Belanda. Liem sempat ditangkap karena pidatonya dinilai antipemerintah. Saat itu dia mengorganisir pers yang dikelola masyarakat keturunan China, Arab, pribumi maupun indo-Belanda untuk memboikot liputan sepak bola karena ada diskriminasi. Perusahaan surat kabar peranakan tidak mendapat posisi khusus, dan orang Belanda menulis tidak perlu ada kerja sama dengan pers peranakan. Liem kemudian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tanggal 25 September 1932 di Surabaya. Dia berpidato panjang lebar soal konsep Indonesier yang diyakininya "Seorang peranakan, tidak peduli turunan dari bangsa apa saja, tetapi jika ia berasa dan berpikir seperti seorang Indonesier asli dan bersedia untuk menjalankan kewajibannya terhadap negeri yang ia cintai ini sebagai tumpah darahnya, maka boleh sekali mengaku sebagai Indonesier," kata Liem.

Liem terus memperjuangkan keyakinannya. Bahkan dia pernah dibacok oleh kelompok China pendukung Belanda. Tapi dia tidak pernah berhenti menyuarakan asimilasi. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Liem duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Soekarno dan Hatta.

Tahun 1948 pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) meletus di Madiun. Salah satu anggota PTI Oey Gee Hoat yang dianggap terlibat PKI. Oey ditangkap dan dibunuh. Setelah pemberontakan PKI, pemerintah gencar melakukan razia pada orang-orang yang

dianggap komunis. Tidak jelas apa peran Liem, tapi dia ikut ditangkap dalam razia Agustus 1951. Saat itu Liem sudah lemah dan sakit-sakitan. Dia berusaha membela diri, tetapi petugas tetap menahannya tanpa pengadilan. Liem dianggap kekiri-kirian. Pembelaan dirinya tidak dianggap. Inilah kali pertama Liem dipenjarakan oleh bangsanya sendiri. Kondisi tahanan sangat buruk. Sakit Liem bertambah parah di dalam penjara. Dengan alasan kesehatan pula Liem akhirnya dibebaskan tanggal 29 Oktober 1951. Dalam keadaan tertekan dan emosi dia melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Sesuatu yang dia perjuangkan tanpa henti selama dua puluh tahun. Liem akhirnya memilih menjadi warga negara Tionghoa. Lewat sikapnya, dia ingin melawan pemerintah saat itu yang dinilai sewenang-wenang. Belakangan, banyak kawan Liem yang mengaku Liem sangat menyesal mengambil keputusan politik itu. Sebagian lagi berpendapat Liem tidak kuat menerima kenyataan dia ditahan bangsanya sendiri. Liem mundur dari dunia pergerakan dan pentas politik. Dia membuka apotek di kawasan Tanah Abang dan berniat membuka cabang di Medan. Dalam perjalanan ke Medan, Liem mendapat serangan jantung dan meninggal tanggal 5 November 1952. Liem meninggal di Indonesia yang sangat dicintainya, walau saat itu dia bukan warga negara Indonesia lagi.

### **Kwee Kek Beng**

Kwee Kek Beng Seorang sastrawan Betawi peranakan Tionghoa, wartawan kenamaan dan pemimpin redaksi surat kabar *Sin Po* (Jakarta). Tulisannya banyak mengagungkan nasionalisme negeri leluhurnya, meskipun demikian karya-karyanya yang sangat khas menggambarkan kehidupan masyarakat Betawi. Namun demikian ia bisa akrab bergaul dengan tokoh pergerakan nasional Indonesia. Kwee Kek Beng lahir di Jakarta, 16 Nopember 1900 dan meninggal 31 Mei 1975. Ia seringkali menggunakan nama samaran "Anak Jakarta atau Garem". Kek Beng memulai menulis sejak ia duduk di HCK (*Hollands Chinese Kweek school*) di Jatinegara,

Jakarta. Setelah lulus (1922) ia menjadi guru di Bogor, tetapi tak lama kemudian ia pindah ke surat kabar *Bin Seng* dan kemudian ke *Sin Po*. Kariernya terus menanjak sampai ia menjadi pemimpin redaksi surat kabar *Sin Po* yang pernah menolak tulisannya. Kek Beng termasuk wartawan peranakan yang dicari-cari Jepang ketika negara ini menduduki Indonesia. Namun ia berhasil menyembunyikan diri di Bandung. Kek Beng akrab bergaul dengan para pemimpin pergerakan nasional terutama dari kalangan Partai Nasional Indonesia. Sebagai pemimpin redaksi ia mengizinkan pamuatan lagu Indonesia Raya dalam surat kabar *Sin Po*, karena pengarang lagu tersebut (W.R. Supratman) juga wartawan di surat kabar itu.

#### **Periode Sesudah Kemerdekaan Identitas Tionghoa Perantauan**

Pada saat Indonesia telah merebut kemerdekaan politiknya dari pemerintah Belanda, perasaan nasionalis Tionghoa di kalangan masyarakat Tionghoa-Indonesia yang berpendidikan Tionghoa masih kuat. *Xin Bao*, edisi *Sin Po* berbahasa Tionghoa, dalam editorialnya sebelum dibukanya Konferensi Meja Bundar (1949) antara Belanda dan Indonesia, mengingatkan kedua pemerintahan untuk memberikan tempat kepada orang Tionghoa Indonesia sebagai minoritas dalam Indonesia yang merdeka. Pada saat itu, *Xin Bao* masih menganggap masyarakat Tionghoa Indonesia sebagai sebuah kelompok yang homogen dan menyebut mereka sebagai Huaqiao (Tionghoa Perantauan) bukan Huaren atau Huazu (Etnis Tionghoa). Song Zhongquan, Presiden Organisasi Tionghoa perantauan sayap-kiri, Qiao Zong (Jakarta), percaya bahwa orang-orang Tionghoa akan tetap sebagai orang asing di Indonesia sementara mereka bekerja sama dengan masyarakat Indonesia.

#### **Kalangan Pluralis**

Setelah kemerdekaan Indonesia, ada masyarakat Tionghoa yang mengidentifikasi diri mereka dengan Tiongkok, baik secara politik maupun budaya. Tetapi, sejumlah besar

masyarakat Tionghoa peranakan mengidentifikasi diri mereka secara politik dengan Indonesia, walaupun secara budaya mereka ingin tetap sebagai orang Tionghoa Indonesia. Kalangan Tionghoa ini awalnya bergabung dalam Persatuan Tionghoa (berdiri tahun 1948) yang kemudian (tahun 1950) mengubah namanya menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI). Thio Thiam Tjong, sebagai mantan pemimpin CHH yang juga Presiden Persatuan Tionghoa, menegaskan bahwa walaupun masyarakat Tionghoa Indonesia memilih kebangsaan kebangsaan Indonesia, mereka dapat memelihara identitas budaya mereka. Namun, ia menentang berbagai jenis ideologi yang ekstrim, seperti termasuk militerisme dan kediktatoran pioletariat. Khoe Woen Sioe, jurnalis peranakan yang juga sekretaris Persatuan Tionghoa (dan kemudian menjadi PDTI). Khoe Woen Sioe menekankan betapa pentingnya Tionghoa lokal melibatkan diri mereka dalam politik, karena ini adalah sebuah senjata untuk mempertahankan kepentingan Tionghoa sebagai sebuah kelompok minoritas. Kedudukan PDTI kemudian diganti oleh BAPERKI (1945) yang masih mengikuti garis yang sama, dalam arti mempertahankan kepentingan minoritas Tionghoa. Ketua Baperki adalah Siauw Tjhan yang pernah menjadi Direktur *Harian Rakjat*. Siauw menegaskan bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sudah menjadi warga negara Indonesia, dan oleh karena itu, mereka tidak perlu mengubah nama Tionghoa mereka menjadi nama Indonesia atau mewakili penduduk pribumi Indonesia. Selain itu, mereka tidak harus mengubah agamanya menjadi agama lainnya yang dianggap sebagai "Indonesia". Dengan kata lain orang Tionghoa Indonesia peranakan harus diakui sebagai suku di Indonesia. Siauw tidak setuju pembauran orang-orang Tionghoa Indonesia peranakan yang dipaksakan ke dalam masyarakat pribumi; walaupun ia juga tidak setuju adanya diskriminasi rasial. Mengakui adanya konflik rasial dan etnis di Indonesia, ia mengusulkan jalan keluarnya melalui sebuah revolusi

sosialis bukan dengan proses pembauran.

Mantan pemimpin Baperki yang lain adalah seorang pengacara Kristen, Yap Thiam Hien, juga menyokong pluralisme etnis pada masyarakat Indonesia. Sebagaimana Siauw, ia tidak setuju dengan jalan keluar pembauran terhadap masyarakat Tionghoa, tetapi berbeda dengan Siauw, ia tidak berfikir bahwa sebuah Revolusi Sosial akan memecahkan persoalan. Ia kemudian menganjurkan sebuah formula Kristen sebagai jalan keluarnya, yang meliputi “pembersihan jiwa” (heart cleansing) dan “percaya kepada Yesus Kristus” (believing in Jesus Christ) disamping pelaksanaan undang-undang antidiskriminasi rasial. Kwik Kian Gie, seorang Ekonom yang kemudian bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpendapat bahwa pembauran telah dicapai. Bagaimanapun, ia menegaskan bahwa berlanjutnya pemisahan *pri* dan *non-pri* di Indonesia pada dasarnya adalah ciptaan sejumlah pemimpin pembauran. Dalam tulisan yang lain, ia mengakui bahwa ketegangan antara *pri* dan *non-pri* memang ada, namun ini terjadi pada setiap masyarakat. Ia menegaskan bahwa masalahnya harus dilihat dalam sebuah pandangan yang memadai. Kenyataannya, idenya mengenai “pembauran” (assimilation) sangat dekat dengan “integrasi” (integration).

#### Kalangan Pembauran

Lawan Baperki adalah sebuah kelompok yang lebih kecil; yang mendukung “pembauran penuh”. Kelompok ini yang kemudian dikenal sebagai Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPBK), seringkali menegaskan bahwa Liem Koen Hian dan PTI-nya sebagai “Bapak” dari ide asimilasi, meskipun Liem sendiri sebelum perang lebih menganjurkan “asimilasi politik” dibandingkan “asimilasi total” ala LPBK. Pada tahun 1950 Liem dan kalangan pribumi Indonesia lainnya mendirikan Persatuan Tenaga Indonesia, sebuah partai multirasial yang berumur pendek, yang merupakan oposisi terhadap partai etnis Tionghoa, Persatuan Tionghoa.

Hanya pada tahun 1952 beberapa kalangan Tionghoa peranan mengusulkan pembubaran partai/organisasi Tionghoa dan bergabung dengan partai/organisasi yang didominasi kalangan pribumi. Salah satu pemimpinnya adalah Lauw Chuan Tho, seorang ekonom lulusan Belanda yang mengusulkan pembubaran Chung Hwa Hui (CHH) - organisasi etnis Tionghoa yang serupa di Belanda. Gerakan asimilasi (pembauran) mencapai puncaknya pada saat sepuluh tokoh Tionghoa peranan mendeklarasikan “pembauran penuh” sebagai sebuah jalan keluar terhadap masalah minoritas Tionghoa tahun 1960 yang diikuti dengan “Piagam Asimilasi” (Assimilation Charter) yang dikeluarkan tahun 1961. Lauw Chuan Tho, Ong Hok Ham (mahasiswa sejarah) dan Tjung Tin Jan (pengacara Katolik terkemuka) adalah beberapa tokoh dari gerakan ini.

Gerakan pembauran (asimilasi) ini tidak berkembang secara cepat selama era Soekarno karena keberadaan Baperki. Tapi setelah kudeta 1965, Baperki dilarang, kalangan pembauran mulai melakukan serangan mereka, mempromosikan asimilasi total masyarakat Tionghoa Indonesia. Jahja Wullur (alias Oeu Tjin San, seorang pengajar di universitas) dan Pek Hien Liang (seorang aktivis gereja), misalnya, berpendapat mengenai pentingnya pembauran dan penggunaan nama Indonesia bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Yap Thiam Hien, seorang pluralis, menanggapi tantangan pembauran ini, dan Junus Jahja (alias Lauw Chuan Tho), seorang pendukung pembauran yang menjadi seorang muslim tahun 1979, melihat beralihnya kalangan Tionghoa menjadi penganut agama Islam adalah jalan keluar satu-satunya atas masalah Tionghoa.

#### Tokoh Tionghoa

##### P.K. Ojong

Persoalan menegakan keadilan sosial dalam sistem kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh proses industrialisasi mendorong terbentuknya *Fabian Society* pada 1884 di Inggris, 11 tahun sebelum kaum buruh industri di negeri itu mengorganisasikan gerakan



perbaikan nasibnya di dalam *The Labour Party* (partai Buruh). Kaum buruh itu dipengaruhi oleh ide sosialisme *fabian*, yang digumuli oleh satu barisan yang tangguh dari golongan intelektual pejuang. Diantaranya terdapat banyak penulis dan pengarang. Lingkungan pekerjaan pers di mana saja dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dalam sistem ekonomi industrialis. Maka persoalan menegakkan keadilan sosial, yang digumuli oleh tokoh-tokoh pers seperti juga halnya banyak tokoh pers Indonesia dipengaruhi oleh lingkungan pekerjaan mereka. Petrus Kanisius Ojong atau Auwjong Peng Koen Lahir di Bukittinggi, 25 Juli 1920, dengan nama Auw Jong Peng Koen ia adalah salah satu pendiri surat kabar Kompas selain Jakob Oetama. Ia dilahirkan dalam keluarga imigran Tionghoa, dididik pada masa mudanya di sekolah-sekolah katolik dan sekolah yang eksklusif bagi anak-anak Tionghoa. Tetapi, karena pekerjaannya sebagai wartawan, ia mengalami proses sosialisasi sebagai seorang nasionalis dan patriot, yang berjuang menegakkan keadilan sosial sesuai dengan visi kemasyarakatannya, yang diilhami oleh aliran sosialisme *fabian*. Lembaga Kompas-Gramedia, yang dirintis dan dikembangkan - terbitan perdananya, 28 juni 1965 bersama Jacob Oetama, merupakan salah satu perwujudan operasional dari cita-cita besar itu.

#### **Abdul Karim Oey**

Abdul Karim Oei Tjeng Hien adalah perintis ajaran Islam dari etnis Tionghoa-Indonesia. Dia mendirikan organisasi warga etnis Tionghoa Islam yang disebut Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan juga menjadi salah satu tokoh Muhammadiyah. Karim Oei juga merupakan salah satu tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno dan Buya Hamka. Dalam dunia politik, Karim Oei juga dikenal sebagai anggota DPR (1956-1959) yang mewakili kaum Tionghoa, ketua partai Masyumi Bengkulu (1946-1960), dan lain sebagainya. Karim Oei dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 6 Juni 1905 dengan nama asli Oei Tjeng Hien. Sejak usia 2 bulan, dia menjadi

piatu dan dibesarkan oleh kakak iparnya. Pendidikan yang pernah ditempuh Karim Oei adalah Sekolah Dasar Zaman Belanda dan kursus pedagang. Pada tahun 1926, Karim Oei mulai menjadi pemeluk agama Islam yang saat itu sangat jarang dilakukan oleh warga Tionghoa. Pada tahun 1967-1974, dia aktif menjabat sebagai Pimpinan Harian Masjid Istiqlal Jakarta, anggota Dewan Penyantun BAKOM PKAB, dan anggota Pengurus MUI Pusat.

#### **Yap Thiam Hien**

Yap Thiam Hien (lahir di Koeta Radja, Aceh, 25 Mei 1913 - meninggal di Brusel, Belgia, 25 April 1989 pada umur 75 tahun) adalah seorang pengacara Indonesia keturunan Tionghoa. Ia mengabdikan seluruh hidupnya berjuang demi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Namanya diabadikan sebagai nama sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yap Thiam Hien, yang biasa dipanggil "John" oleh teman-teman akrabnya, adalah anak sulung dari tiga bersaudara dari Yap Sin Eng dan Hwan Tjing Nio. Kakek buyutnya adalah seorang Luitenant yang bermigrasi dari provinsi Guangdong di Tiongkok ke Bangka, namun kemudian pindah ke Aceh. Ketika monopoli opium di Hindia Belanda dihapuskan, kehidupan keluarga Yap dan banyak tokoh masyarakat Tionghoa saat itu merosot. Ditambah lagi oleh kekeliruan investasi di Aceh berupa kebun kelapa yang ternyata tidak memberikan hasil yang menguntungkan. Pada tahun 1920 kedudukan keluarga Yap digantikan oleh keluarga Han, yang datang dari Jawa Timur.

Thiam Hien dibesarkan dalam lingkungan perkebunan yang sangat feodalistik. Kondisi lingkungan feodalistik ini telah menempa pribadi cucu Kapitan Yap Hun Han ini sejak kecil bersifat memberontak dan membenci segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan.

Pada usia 9 tahun, ibu Thiam Hien meninggal dunia. Ia dan kedua orang adiknya kemudian dibesarkan oleh Sato

Nakashima, seorang perempuan Jepang yang merupakan gundik kakeknya. Sato ternyata memainkan peranan besar dalam kehidupan Thiam Hien, memberikan kemesraan keluarga yang biasanya tidak ditemukan dalam keluarga Tionghoa serta rasa etis yang kuat yang kelak menjiwai kehidupan Thiam Hien di masa dewasa.

Yap Sin Eng, ayah Thiam Hien, ternyata adalah figur yang lemah. Namun Sin Eng ikut membentuk kehidupan anak-anaknya, karena ia memutuskan untuk memohon status hukum disamakan (gelijkstelling) dengan bangsa Eropa. Hal ini memungkinkan anak-anaknya memperoleh pendidikan Eropa, meskipun mereka telah kehilangan status sebagai tokoh masyarakat.

### **Masalah dan Prospek**

#### **Etnisitas dan Pembangunan Bangsa**

Pada awalnya pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta hanya berdaulat pada sebagian wilayah Indonesia, sedangkan sisanya masih di tangan pemerintah Belanda. Namun, konflik etnis terjadi tidak hanya antara masyarakat pribumi Indonesia dan Belanda tetapi juga antara etnis Tionghoa dan Indonesia, karena saling prasangka dan situasi yang membingungkan. Meskipun terdapat konflik antara masyarakat Indonesia dengan Tionghoa, beberapa pemimpin Tionghoa tetap mendukung pemerintahan Republik dan yang lainnya bersifat kritis terhadap pemimpin Indonesia. Tjoa Sik len, dokter peranakan berhaluan “kiri” yang pernah menjadi ketua PTI sebelum perang, dan mengidentifikasikan dirinya dengan pemerintahan Indonesia, mendorong masyarakat Tionghoa untuk menjadi warga negara Indonesia. Goh Tjing Hok, seorang jurnalis juga bersimpati terhadap masyarakat Indonesia. Ia mengatakan, karena masyarakat Tionghoa merayakan hari nasional, mereka di Indonesia ketika masyarakat Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonial, etnis Tionghoa harus pula berupaya membantu masyarakat Indonesia. Tetapi, Kwee Kek Beng, mantan Pimpinan redaksi *Sin Po*, sangat

kritis terhadap Indonesia dengan menyebut mereka sebagai teroris dan tidak lagi bersimpati terhadap tujuan nasional Indonesia.

Tjoa Sik len dan Siauw Giok Tjhan dalam sebuah tulisan bersama mengenai pendidikan anak-anak peranakan di Indonesia yang merdeka, menyokong pendidikan nasional bagi anak-anak peranakan dan mengusulkan pengenalan sebuah kurikulum yang memuat kandungan nasional ke sekolah-sekolah menengah yang menggunakan bahasa Tionghoa. Tjoa Tjie Liang, mantan pimpinan PTI, yang menganalisis pembangunan bangsa di Indonesia berpendapat bahwa perubahan nama Tionghoa adalah salah satu cara untuk mencapai sebuah bangsa yang homogen. Namun ia mengakui bahwa proses tersebut tidak dapat sepenuhnya dicapai dalam periode yang pendek.

Siouw Giok Tjhan mengkritik kebijakan pemerintah yang memperlakukan masyarakat pribumi Indonesia lebih baik setelah Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Ia menekankan kembali kerja sama antara masyarakat non pribumi dan pribumi dan berpendapat bahwa hanya melalui pembangunan ekonomi nasional dimana masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa dilibatkan maka Indonesia dapat menghapuskan struktur ekonomi kolonial dan mencapai kemakmuran.

Soe Hok Djin (yang kemudian bernama Arief Budiman) seorang generasi muda peranakan yang menjadi seorang intelektual dan penulis terkenal menganjurkan pembauran budaya bukan pembauran politik sebagai senjata untuk persatuan pembangunan bangsa, sebuah konsep yang berbeda dengan Siouw Giok Tjhan.

Para tokoh Tionghoa totok tidak berbicara mengenai pembangunan bangsa tapi harmoni rahasia melalui sebuah perubahan dalam pola kegiatan ekonomi Tionghoa. Mereka mendorong masyarakat Tionghoa untuk berpindah dari sektor perdagangan ke sektor industri dalam membantu membangun Indonesia secara ekonomis. Perubahan dari perdagangan ke industri pada kenyataannya tidak sepenuhnya berhasil. Mereka yang memiliki

perusahaan perdagangan asing (khususnya yang dimiliki kalangan Tionghoa) menjadi sasaran nasionalisme ekonomi Indonesia lagi setelah kudeta yang gagal tahun 1965. Lo SH Ginting, sekretaris Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa PKB (Bakom PKB), mendiskusikan transisi yang mulus dalam perusahaan komersial dari pihak asing kepada Indonesia pada akhir tahun 1977 dan akibat-akibatnya terhadap ekonomi Indonesia.

#### **Masalah Tionghoa Indonesia dan Jalan Keluarnya**

Masalah identifikasi telah disebutkan baik oleh para tokoh Tionghoa peranan maupun totok, sebagai masalah utama bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Seorang penulis totok, Qiu Zhengou, anggota KMT, melihat masalah tersebut dari sudut pandang KMT. Ia mendesak kalangan Tionghoa Indonesia untuk mempertahankan “identitas totok” mereka dan bahkan kebangsaan Tionghoa sedapat mungkin karena budaya Tionghoa lebih superior, dan Tiongkok (lebih tepatnya, Taiwan) membutuhkan mereka. Banyak pemimpin totok yang pro-Beijing pada waktu itu juga menganjurkan sebuah identitas Tionghoa perantauan. Tentang kalangan peranan, pembicaraan sebelumnya memperlihatkan bahwa satu kelompok menginginkan untuk tetap menjadi Tionghoa peranan di dalam bangsa Indonesia dan kelompok yang lain bersikeras pada pembauran dan identifikasi yang lengkap bersama masyarakat pribumi Indonesia sebagai satu-satunya jalan keluar bagi masyarakat Tionghoa peranan.

Meskipun demikian, setelah kudeta 1965, masalah Tionghoa masih tetap ada. Argumen yang lama masih berlaku meskipun ada beberapa hal baru. Lie Tek Tjeng, mantan direktur Lembaga Riset Kebudayaan Nasional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LRKN-LIPI) mengatakan bahwa sifat eksklusif masyarakat Tionghoa Indonesia sebagian sebagai akibat dari kebijakan kolonial Belanda. Pembauran

masyarakat Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi lebih dimungkinkan.

Kristoforus Sindhunatha (Ong Tjong Hai), Ketua LPKB yang sudah bubar dan mantan Presiden Bakom-PKB memandang pembauran yang tuntas sebagai satu-satunya jalan keluar untuk masalah Tionghoa. Ia juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia memperkenalkan sebuah kebijakan untuk mempercepat kerjasama antara masyarakat Indonesia non Pribumi dan Pribumi sehingga pembauran tuntas masyarakat Indonesia non Pribumi akan terjadi dalam lapangan ekonomi.

Lo SH Ginting, seorang sosiolog peranan yang juga mantan sekretaris Bakom-PKB berpendapat bahwa masalah Tionghoa yang saat ini lebih dikenal sebagai masalah pribumi dan non pribumi harus dipahami dan dikaji secara memadai. Dalam konteks pembangunan bangsa, ia mengusulkan agar kalangan Tionghoa, publik Indonesia dan pemerintah bersama-sama berupaya mencari jalan keluar yang baik. Sedangkan Kristianto Wibisono, seorang mantan jurnalis dan konsultan berpendapat bahwa proses pembangunan bangsa adalah usaha keras jangka panjang dan demokrasi ekonomi serta politik adalah jawaban terhadap masalah Tionghoa.

Seorang pemimpin gerakan pembauran Harry Tjan Silalahi menawarkan pandangannya dengan mengusulkan integrasi dan bukan pembauran penuh bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia untuk menuju abad ke 21, dan sementara itu, tokoh lainnya Junus Jahja, yang telah memeluk agama Islam, menganjurkan kerjasama bisnis antara kalangan pengusaha etnis Tionghoa dan Muslim untuk mencapai solidaritas nasional. Faktor ekonomi semakin sering disebut sebagai penyebab timbulnya masalah Tionghoa dan beberapa konglomerat Tionghoa yang ditekan pemerintah mengeluarkan Deklarasi Bali, yang menjanjikan bantuan kepada kelompok ekonomi lemah dan pembagian pembangunan ekonomi yang lebih layak sebagai jawaban atas “masalah etnis Tionghoa”, meskipun istilah etnis

Tionghoa ini tidak muncul dalam dokumen.

Masyarakat Tionghoa perantauan dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang rumit dan sukar, tetapi kita dapat mengelompokkan masalah-masalah tersebut sebagai berikut :

#### ❖ Masalah Politik

Dewasa ini masyarakat Tionghoa perantauan menghadapi dua masalah politik utama. Yang pertama adalah tekanan pemerintah daerah yang memaksa masyarakat Tionghoa menjadi warganegara lokal tapi aktivitas politik mereka dibatasi. Tekanan yang lain dari kalangan bandit komunis. Mereka bekerja sama dengan otoritas militer menindas masyarakat Tionghoa yang potensial dan anti-komunis. Kalangan komunis ini membagi masyarakat Tionghoa perantauan berdasarkan garis ideologi dan berupaya membuat masyarakat Tionghoa perantauan sebagai masyarakat merah. Mereka menggunakan kalangan Tionghoa perantauan yang merah ini dan beberapa elemen yang pro-komunis untuk terlibat dalam aktivitas subversif. Ini membuat pemerintah daerah dan masyarakat marah (benci) kepada masyarakat Tionghoa perantauan pada umumnya.

#### ❖ Masalah Ekonomi

Status ekonomi masyarakat Tionghoa perantauan adalah sangat penting. Kekuatan ekonomi mereka sangat besar. Kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat Tionghoa perantauan sebagian besar tergantung pada dukungan ekonomi Tionghoa perantauan. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini, semua pemerintahan di Asia Tenggara telah memberlakukan kebijakan anti-Tionghoa dalam bidang keuangan dan ekonomi. Sebagai contoh, mereka melarang kalangan Tionghoa perantauan mengelola sejumlah perusahaan; disamping, mereka sudah mengumumkan dekret nasionalisasi sektor-sektor perdagangan dan industri untuk membatasi kekuatan ekonomi masyarakat Tionghoa perantauan. Yang lebih parah, mereka telah mengambil alih perusahaan-perusahaan. Ini telah menciptakan ancaman yang serius bagi ekonomi kalangan Tionghoa perantauan.

#### ❖ Masalah Budaya

Munculnya masalah budaya masyarakat Tionghoa perantauan adalah akibat dari goncangnya fondasi budaya Tionghoa dalam masyarakat Tionghoa perantauan. Sebagian kalangan Tionghoa perantauan telah meninggalkan tradisi budaya Tionghoa untuk mengejar kehidupan materialistik dan mewah. Generasi muda Tionghoa perantauan juga telah dipengaruhi oleh lingkungan lokal dan menolak menerima pendidikan Tionghoa. Mereka tidak lagi belajar bahasa Tionghoa. Pada saat yang sama, pemerintah daerah telah mengadopsi kebijakan anti-Tionghoa perantauan, dalam arti mereka secara ketat mengawasi sekolah-sekolah yang diperuntukan bagi kalangan Tionghoa perantauan dan membatasi pengajaran kursus-kursus bahasa Tionghoa, sehingga dengan demikian penyebaran budaya Tionghoa dan pemahaman antar budaya menjadi tidak mungkin. Generasi muda Tionghoa perantauan dan keturunannya saat ini, karena kurangnya budaya dan pendidikan Tionghoa, akan membawa akibat buruk pada masyarakat Tionghoa secara umum.

#### ❖ Masalah Sosial

Pada masa lalu, anggota komunitas Tionghoa perantauan pada umumnya mematuhi adat dan tradisi Tionghoa. Kalangan Tionghoa ini memiliki etika yang tinggi dan mereka menghargai komitmen mereka. Mereka juga menekankan hubungan sosial dan kehidupan keluarga yang harmonis. Tetapi, masyarakat Tionghoa perantauan dewasa ini semrawut. Ini tercermin dalam kemunafikan, perpecahan, konflik, dan fenomena aneh lainnya. Pada masa lalu keluarga Tionghoa bahagia dan tenang tapi dewasa ini kebanyakan anak-anak muda berpandangan keluar (outward-looking), dan bahkan banyak yang kawin dengan orang asing, akibatnya masyarakat Tionghoa yang harmonis telah dihancurkan. Dampaknya terhadap anak-anak mereka juga benar-benar tidak diinginkan. Ini telah menciptakan masalah yang baru bagi masyarakat Tionghoa perantauan.

Untuk memecahkan masalah-masalah yang disebutkan di atas, kita memiliki cara sebagai berikut:

Cara pertama, kebangkitan Tiongkok, yang artinya keberhasilan Republik Tiongkok menaklukkan daratan Tiongkok, sehingga Tiongkok akan bersatu kembali di bawah Republik Tiongkok. Jika ini terjadi, negara-negara lain akan mencabut kebijakan anti-Tiongkok dan membangun hubungan persahabatan dengan kita. Pemerintah kita dapat mengadopsi kebijakan yang aktif untuk melindungi kepentingan kalangan Tionghoa perantauan, sehingga masalah Tionghoa perantauan dapat dipecahkan dengan baik. Ini adalah dasar dan cara yang paling efektif untuk memecahkan masalah Tionghoa perantauan.

Cara kedua, kita harus berusaha mendekati berbagai negara sehingga mereka akan bersimpati dengan negara kita (Taiwan) dan memahami Tionghoa perantauan. Dengan demikian, negara-negara ini akan mengubah kebijakan anti-Tionghoa perantauan mereka, dan memakai angkatan kerja dan modal Tionghoa perantauan. Masyarakat setempat dan Tionghoa perantauan akan bekerja sama dalam membangun negara untuk mencegah agresi Komunis untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini adalah cara yang paling praktis untuk memecahkan masalah Tionghoa perantauan pada saat ini.

Cara ketiga, adaptasi masyarakat Tionghoa perantauan. Pada saat ini, masyarakat Tionghoa perantauan yang berada dalam situasi sulit harus tetap tenang dan toleran. Mereka tidak boleh membuat penduduk lokal membenci mereka. Mereka harus memperkuat ikatan dengan penduduk setempat dan berpartisipasi dalam pembangunan setempat, sehingga mereka dan penduduk setempat akan saling menyenangkan dan harmoni. Ini akan menimbulkan kerjasama yang tulus.

#### **Pasca 1998**

Bulan Mei 1998 merupakan bulan penting dalam sejarah politik Indonesia. Orde Baru Soeharto telah ditumbangkan dan Indonesia masuk dalam Era Reformasi. Dalam pasca Soeharto ini,

otoritarianisme telah dicampakkan dan demokrasi dijunjung tinggi. Suasana baru ini sudah tentu mempengaruhi pikiran politik minoritas Tionghoa. Asimilasi zaman Soeharto sudah kurang laku lagi dan multikulturalisme menjadi pegangan para elit pasca Orde Baru, setidaknya hal ini adalah pendirian umum yang ditonjolkan.

Politik asimilasi Orde Baru memberi dampak luar biasa terhadap masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat minoritas Tionghoa khususnya. Masyarakat Tionghoa telah lebih terintegrasi atau lebih "membaur" daripada sebelum Orde Baru. Hal ini disebabkan oleh politik asimilasi yang menghapus tiga pilar kebudayaan Tionghoa, yaitu organisasi Tionghoa, media massa Tionghoa, dan sekolah / pendidikan Tionghoa. Akan tetapi, masyarakat Tionghoa masih tidak menjadi homogen. Dalam corak kebudayaan, meskipun anak-anak Tionghoa totok telah mengalami peranakanisasi bahkan Indonesianisasi, banyak dari mereka yang hanya bisa berbahasa Indonesia namun identitas keTionghoannya masih bertahan. Disamping itu, angkatan tua atau yang lahir dan dibesarkan sebelum tahun 1965 juga masih aktif. Adalah keliru jika kita hanya melihat keseragaman kelompok Tionghoa semata-mata tanpa menghiraukan kemajemukannya. Kemajemukan Tionghoa ini telah tercermin dalam pemikiran politik masyarakat pada saat ini.

Meskipun kerusuhan anti Tionghoa bukan merupakan hal baru dalam sejarah Republik Indonesia, tetapi peristiwa Mei 1998 sangat mengejutkan karena kekejaman dan sasaran yang dibuat oleh si pelaku. Bukan saja harta benda orang Tionghoa yang menjadi sasaran, tetapi juga nyawa. Yang paling mengerikan adalah pemerkosaan wanita dan gadis Tionghoa. Secara sistematis yang direncanakan oleh kelompok tertentu sehingga masyarakat Tionghoa mengalami trauma yang tidak pernah mereka alami sebelumnya dalam beberapa dekade ini. Begitu pula pemisahan Pri dan Nonpri masih mengakar kuat dan sulit untuk dikikis habis.

Tokoh-tokoh dari kalangan Tionghoa baik tokoh maupun peranakan mulai berfikir kembali dari mereka ada yang mulai meragukan apakah di dalam konsep Bangsa Indonesia masih ada tempat bagi etnis Tionghoa. Pada umumnya para tokoh Tionghoa peranakan masih menganggap etnis Tionghoa adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Namun, negara seringkali berbuat tidak adil terhadap kelompok minoritas rasial ini. Kristianto Wibisono, membahas hubungan antara mayoritas dan minoritas dalam era demokrasi. Ia mengatakan bahwa di Indonesia perasaan rasial sangat mendalam dan telah disalahgunakan oleh kaum elite.

Eddie Lembong, Ketua umum INTI membahas nasionalisme Indonesia yang di dalamnya terdapat dua jenis konsep bangsa, yaitu Etnonasionalisme dan Nasionalisme ala Bung Karno. Ia membahas bahwa sejak dulu etnis Tionghoa telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan sudah seharusnya semua diskriminasi dalam segala bidang dihapuskan demi kesatuan bangsa. Sedangkan Tedy Jusuf, Ketua Umum PSMTI membahas kebijakan negara setelah jatunya Orde Baru dan juga keadaan masyarakat Tionghoa. Ia menganjurkan integrasi Tionghoa tetapi bukan asimilasi. Disamping itu, ia juga mengatakan bahwa istilah Cina itu diberikan kepada Tionghoa asing, sedangkan warga negara Indonesia disebut Tionghoa. Tetapi, Arief Budiman berpendapat bahwa istilah Cina yang tadinya mengandung penghinaan kini telah bisa diterima karena untuk melawan penghinaan yang terbaik adalah menerima istilah penghinaan itu dan menggunakannya seperti istilah biasa. Menggunakan istilah Tionghoa akan mementahkan "masalah Tionghoa". Baginya, yang terpenting adalah menentang diskriminasi.

Kwik Kian Gie, mantan Menko dan Ketua Bappenas mengakui bahwa masalah Tionghoa itu ruwet dan sukar diselesaikan. Karena masyarakat Tionghoa itu majemuk, tidak ada penyelesaian untuk semua. Ia berpendapat bahwa masalah Tionghoa jangan ditinjau dari sudut pri dan

nonpri, tetapi dari sudut antar suku karena suku pri mempunyai masalah yang mirip dengan etnis Tionghoa.

### **Analisis Nasionalisme Etnik Tionghoa di Indonesia**

Dalam pandangan teori nasionalisme, bahasan mengenai Etnik Tionghoa di Indonesia menurut analisis penulis, ada dua teori nasionalisme, yaitu :

#### **Teori Nasionalisme Ernest Renan (1882)**

Dasar dari suatu paham kebangsaan, yang menjadi bekal bagi berdirinya suatu bangsa, ialah suatu kejayaan bersama di zaman yang lampau dimilikinya orang-orang besar dan diperolehnya kemenangan-kemenangan, sebab penderitaan itu menimbulkan kewajiban-kewajiban, yang selanjutnya mendorong ke arah adanya usaha bersama. Lebih lanjut Ernest Renan (1882) mengatakan bahwa hal penting yang merupakan syarat mutlak adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya. Menurut teori Ernest Renan, jiwa, rasa, dan kehendak merupakan suatu faktor subjektif, tidak dapat diukur dengan faktor-faktor objektif. Faktor agama, bahasa, dan sejenisnya hanya dapat dianggap sebagai faktor pendorong dan bukan merupakan faktor pembentuk (*constitutive element*) dari bangsa. Karena merupakan plebisit yang diulangi terus-menerus, maka bangsa dan rasa kebangsaan tidak dapat dibatasi secara teritorial, sebab daerah suatu bangsa bukan merupakan sesuatu yang statis, tapi dapat berubah-ubah secara dinamis, sesuai dengan jalannya sejarah bangsa itu sendiri.

Teori Renan menegaskan kemauan bersama diperlukan supaya semua daerah dari satu negara akan mempunyai pengaruh dalam komunitas dunia. Dari konsep nasionalisme Ernest Renan pada masa itu telah

membangkitkan rasa nasionalisme tokoh-tokoh Tionghoa di Indonesia seperti Tjoe Bou San dan Kwee Tek Hoay. Teori Renan mengatakan bahwa etnisitas tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Jadi nasionalisme bisa jadi dalam suatu komunitas yang multi etnis, persatuan agama juga tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Persatuan bahasa mempermudah perkembangan nasionalisme tetapi tidak mutlak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Dalam hal nasionalisme, syarat yang mutlak dan utama adalah adanya kemauan dan tekad bersama.

#### **Teori Nasionalisme Benedict Anderson (1983)**

Benedict Anderson memahami nasionalisme sebagai komunitas khayalan (*Imagined Community*) yang disatukan oleh sebuah persahabatan horizontal yang mendalam di mana anggota-anggotanya diyakini mengkonstitusi (menciptakan) sebuah entitas yang kuat dan utuh. Bagi Anderson, komunitas khayalan ini ada atau terbentuk karena kekuatan media massa, khususnya media cetak. Media cetak sangat berperan dalam menyebarkan diseminasi (penggandaan) gagasan/ide. Anderson menekankan bahwa bacaan atas surat kabar harian atau majalah mingguan yang secara teratur dan sinkronik membentuk para pembacanya untuk berbagi perasaan, gagasan atau serangkaian minat bersama, karena isi dan fokus dari berita. Menurut Anderson, pengalaman kebangsaan berakar setiap hari karena *shared reading* ini.

Melalui proses penyebaran informasi dari industri media massa ini, memberikan pengaruh besar terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Proses pembentukan nasionalisme menurut Benedict Anderson terjadi seperti itu. Suatu komunitas pada akhirnya memiliki perasaan kebangsaan yang sama karena perasaan itu ditimbulkan oleh kesamaan minat dan perhatian mereka. Kesamaan minat dan perhatian itu ditimbulkan oleh media cetak (koran dan majalah) yang mereka baca. Kesamaan minat dan

perhatian itu pada gilirannya memicu perasaan komunitas tersebut untuk mengkhayalkan sebuah masyarakat tempat mereka hidup bersama sebagai warga masyarakat. Wujud konkret dari komunitas khayalan itu adalah negara. Tentu untuk kasus etnis Tionghoa di Indonesia, pengaruh media massa ini diawali oleh tokoh-tokoh Tionghoa yang mulai punya perhatian terhadap kesadaran kebangsaannya. Di sini memang perasaan lebih memainkan peran daripada pikiran. Nasionalisme sebagai *imagined community* harus lebih menonjolkan perasaan daripada pikiran.

Dalam gerakan yang dilakukan oleh Kwee Tek Hoay dan Kwee Kek Beng misalnya, menurut analisis penulis bisa didekati dengan pendekatan nasionalisme Benedict Anderson. Pengaruh gerakan media massa atau industry cetak yang dikemukakan Anderson cukup besar menggerakkan nilai-nilai perjuangan etnis Tionghoa.

Dalam analisis penulis, gerakan yang dilakukan oleh Kwee Tek Hoay yang berusaha mengembalikan kebudayaan leluhurnya dengan menulis tentang "Agama Tionghoa" yang merupakan gabungan dari tiga agama, yakni Konfusianisme, Buddhisme dan Daoisme (Taoisme), yang dimuat dalam majalah Sam Kauw Gwat Po. Pemikirannya yang dituangkan dalam majalah ini kemudian digulirkannya dan bersifat meluas sebagai bentuk seruan sehingga tidak bisa dilepaskan dari peran media massa atau industry cetak, maka gerakan ini lebih cocok dengan teori nasionalismenya Benedict Anderson. Hal ini memberikan gambaran bahwa gerakan-gerakan nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia tidak lepas dari gerakan massa melalui pengaruh media massa.

#### **KESIMPULAN**

Masalah Tionghoa di Indonesia memang rumit. Sebelum Perang Dunia II ini berkaitan dengan masalah identitas politik, yakni kebangsaan Tionghoa, kekawulaan Belanda dan kebangsaan Indonesia. Kemudian masalah ini juga mengandung dimensi budaya dan ekonomi. Beberapa orang Tionghoa mengidentifikasi diri mereka dengan kalangan Tionghoa perantauan, dan yang

lain dengan kalangan Tionghoa Indonesia atau peranakan Tionghoa. Ada juga para tokoh yang ingin dipandang sebagai sepenuhnya orang Indonesia. Kelihatannya kedua pandangan ini bersaing satu sama lain mencari pendukung mereka. Selain dari masalah identitas, hubungan kalangan Tionghoa Indonesia dengan kekuatan-kekuatan asing, terutama Tiongkok, juga menjadi masalah. Masyarakat Tionghoa Indonesia terbagi ke dalam tiga kelompok. Yang pertama ingin memelihara ikatan politik maupun budaya dengan Tiongkok; yang kedua berharap hanya mempertahankan ikatan budaya, dan bukan politik; dan yang terakhir berupaya untuk memutuskan ikatan baik budaya maupun politik dengan Tiongkok. Pandangan kedua dan ketiga kelihatannya memiliki basis Indonesia.

Posisi ekonomi Tionghoa yang berhadapan dengan pribumi Indonesia merupakan satu masalah lagi. Masyarakat pribumi Indonesia memandang kalangan Tionghoa mendominasi ekonomi mereka dengan caya yang agak berbeda. Sementara banyak tokoh kalangan Tionghoa tidak menyangkal bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia kuat dalam perdagangan, perbankan, dan manufaktur, mereka

tidak merasa bahwa mereka mendominasi ekonomi Indonesia. Karena mengakui adanya ketimpangan antara kalangan Tionghoa dan massa Indonesia, mereka mengusulkan berbagai solusi yang semuanya menolak diskriminasi rasial sebagai cara untuk memecahkan masalah.

Para tokoh Tionghoa Indonesia tidak sependapat dalam mengusulkan solusi terhadap masalah-masalah ini. Kelompok yang satu mengusulkan integrasi politik atau pembauran politik, sementara kelompok lain menyarankan pembauran total sebagai jawaban. Ada juga kelompok yang berupaya untuk mengagungkan identitas Tionghoa. Selain itu, masih ada kelompok yang menganjurkan agar orang Tionghoa memeluk agama Islam. Namun, semua saran tersebut memiliki kelemahan, karena semua pandangan itu tidak mempertimbangkan sifat dasar kemajemukan minoritas Tionghoa dan kerumitan sistem internasional dan nasional Indonesia. Karena itu, masalah etnis minoritas Tionghoa memang sangat rumit. Ini adalah bagian dari masalah kemanusiaan yang lebih besar dalam dunia modern yang perlu didekati dengan penalaran bukan secara emosional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. (1983). *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London: The Thetford Press.
- Kohn, Hans. (1965). *Nasionalism Its Meaning And History*; Malabar Florida: Robert E. Krieger Publishing Company.
- Suryadinata, Leo. (2010). *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Suryadinata, Leo. (2005). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Suryadinata, Leo. (2010). *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Yuanzhi, Kong. (2005). *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.